

**KIPRAH KEPEMIMPINAN SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM
REFLEKSI SEWINDU KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Kevin Bramantya Azis

Email: kevinbramantyo05@gmail.com

Dra. Sulistyowati, M. Si.

Drs. Ahmad Taufiq, M. Si.

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website: <https://fisip.undip.com/> - Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta dahulunya adalah sebuah wilayah kerajaan merdeka yang dikenal dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Sultan Hamengku Buwono. Kekuatan dan eksistensi dari Sultan Hamengku Buwono dikenal sebagai pemimpin yang merupakan perpanjangan dari kekuasaan Tuhan untuk Rakyat Yogyakarta. Selanjutnya, keberadaan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Sultan juga sebagai Gubernur adalah sebuah konsensus yang melahirkan sebuah sistem kepemimpinan yang istimewa dalam tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Dari konsesus tersebut juga disepakati adanya undang undang keistimewaan DIY (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012) yang mengatur segala wewenang dan kewajiban dari Kesitimewaan DIY untuk mengantur pemerintahan daerahnya.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Keistimewaan, Sultan Hamengku Buwono

ABSTRACT

Yogyakarta Special Region was formerly a region of independent kingdom known as the Sultanate of Ngayogyakarta Hadiningrat, led by a king whose title was Sultan Hamengku Buwono. The power and existence of Sultan Hamengku Buwono is known as a leader who is an extension of God's power for the People of Yogyakarta. Furthermore, the existence of Sultan Hamengku Buwono X as Sultan as well as Governor is a consensus that gave birth to a special leadership system in the government order of the Republic of Indonesia. From the consensus, it was also agreed that there is a DIY privileges law (Law No. 13 of 2012) which regulates all authority and obligations of the DIY Speciality to regulate its local government.

Keywords: Leadership, Privileges, Sultan Hamengku Buwono

A. PENDAHULUAN

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah berdiri selama dua abad lamanya setelah adanya perpecahan Kerajaan Mataram Islam hingga saat ini. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini dipimpin oleh Keluarga yang berwangsa Hamengku Buwono, yang pemimpinya bergelar sebagai *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahaman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng kaping ...* (diisi untuk keberapa) *ing Ngayogyakarta*, atau lebih sederhana dikenal sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono.

Dengan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, maka segala sistem tata kelola pemerintah dan kepemimpinan wilayah yang ada menjadi tanggung jawab yang tak terpisahkan oleh Wangsa Hamengku Buwono. Oleh karena itu peran sultan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin adat dan agama memiliki kiprah yang mendalam bagi pengikut Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Sri Paduka Pakualam VIII pada 5 September 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Kesultanan Ngayogyakarta menjadi daerah yang istimewa yang bergabung dengan Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa yang bersifat kerajaan untuk menjalankan pemerintahan daerahnya. Sejak saat itulah Kasultanan Ngayogyakarta menjadi bagian Pemerintah Daerah Istimewa Ngayogyakarta dibawah Pemerintah Pusat Indonesia.

Setelahnya, keistimewaan yang ada sebagai Sultan Hamengku Buwono yang menjadi pemimpin daerah Yogyakarta pada era Kemerdekaan dan era Orde baru yang diemban oleh *swargi dalem* Sultan Hamengku Buwono IX kemudian diteruskan oleh putra dalem beliau yang bernama Herjuno Darypto yang dewasa dianugerahi sebagai *Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH)* Mangkubumi yang kemudian diangkat sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Selanjutnya kelahiran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menegaskan konsensus Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin daerah yang bersifat istimewa. Undang-undang tersebut juga menjabarkan seluruh aspek terkait dengan kehidupan berpemerintah, bersosial dan bermasyarakat yang bersifat Istimewa di Pemerintah DIY. Pada 2020 memasuki sewindu lamanya Undang Undang tersebut tetap kukuh dan dipertahankan yang harus menjadi dasar keberlangsungan Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin daerah yang mampu berkiprah untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakatnya tanpa terkecuali. Sehingga dari Latar belakang yang ada dapat kembangkan sebuah penelitian terhadap kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan cerminan keberhasilan Sultan Hamengku Buwono X dalam memimpin daerahnya. Terlebih lagi dengan dukungan nilai historis yang telah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi nilai yang lebih bagi seorang Sultan Hamengku

Buwono X dalam memangku jabatan Gubernur Yogyakarta. Dengan demikian judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “*Kiprah Sultan Hamengku Buwono X Dalam Refleksi Sewindu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kiprah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang pemimpin di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam refleksi sewindu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Sultan dapat dikatakan sebagai pemimpin yang Transformatif?

C. Tinjauan Pustaka

Kepemimpinan Transformasional

Bass dan Riggio (2006) menyatakan pemimpin transformasional, pada sisi lain mereka (pemimpin) yang merangsang dan menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa dan, dalam prosesnya mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka sendiri. Pemimpin transformasional membantu pengikut tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin dengan menanggapi kebutuhan pengikut individu dengan memberdayakan mereka dan dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pengikut individu, pemimpin, kelompok, dan organisasi yang lebih besar.

Faktor atau nilai atau indikator dari Kepemimpinan Transformasional yang dikemukakan oleh Burns dan dikembangkan oleh Bass dan Riggio (2006) dijabarkan kedalam empat (4) pengaruh besar. Berikut adalah faktor

atau nilai atau indikator yang ada dalam Kepemimpinan Transformasional;

a. Idealized Influence (Pengaruh Ideal atau Karisma Diri)

Faktor pertama yang dikemukakan dalam kepemimpinan transformasional adalah pengaruh ideal atau karisma diri. Penulis memahami sebuah pengaruh ideal seperti yang dikemukakan oleh Bass dan Riggio (2006) bahwa sejatinya para pemimpin dikagumi, dihormati, dan dipercaya. Pengikut mengidentifikasi dengan para pemimpin dan meniru (serta melaksanakan) mereka (pemimpin); pemimpin dianugerahi oleh pengikut mereka sebagai orang dengan kemampuan, ketekunan, dan tekad yang luar biasa..

b. Inspirational Motivation (Inspirasi atau Motivasi Inspirasional)

Faktor kedua dalam teori transformasional adalah sebuah motivasi inspirasional atau inspirasi. Faktor ini dijelaskan oleh Bass dan Riggio (2006) bahwa, pemimpin memiliki sebuah pengaruh motivasi dan inspirasi yang besar kepada pengikut. Motivasi dapat dilakukan oleh pemimpin dengan memberikan sebuah makna atau tantangan terhadap pelaksanaan pekerjaan/gagasan.

c. Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual)

Faktor yang selanjutnya adalah stimulasi intelektual. Bass dan Riggio (2006) memberikan dorongan bahwa seorang pemimpin memberikan sebuah stimulasi intelektual kepada pengikutnya sehingga pengikut mampu menyelesaikan masalah yang

dihadapi dalam lingkup organisasi dengan segala cara yang solutif.

d. Individualized Consideration **(Pertimbangan yang bersifat Individual)**

Faktor keempat dari kepemimpinan transformasional disebut pertimbangan yang bersifat individual. Faktor ini mendorong seorang pemimpin untuk bertindak menjadi seorang mentor bagi pengikut. Pengikut dapat mengembangkan sebuah keputusan pribadi dari pemimpin ke tingkat yang lebih jauh.

D. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjabarkan dan mengulas secara detail peran peran Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur yang diulas dengan teori kepemimpinan Transformasional. Penelitian kualitatif menjadi suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Creswell: 2016). Penelitian ini mewujudkan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus sesuai yang diambil secara ilmiah dengan tujuan menggambarkan dan menafsirkan suatu kejadian dan realita sosial yang terjadi pada masyarakat terlebih lagi penelitian yang terjadi pada bidang ilmu politik dan pemerintahan.

E. Pembahasan

Setelah jauh dari peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia dan melewati masa masa pemerintahan yang ada di Indonesia, hingga hari ini Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berdiri utuh dan kokoh sebagai pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Penegasan hal tersebut

kemudian dikukuhkan kedalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi akomodir dari pemerintahan daerah yang bersifat istimewa tersebut. Hal ini merupakan hasil jerih payah dari perjuangan segenap masyarakat di DIY, terlebih peran besar dari seorang Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hingga tahun 2020 lalu, genap sewindu pengakuan kedaulatan Pemerintah Daerah DIY yang istimewa ini. Hal ini juga menandakan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY selama sewindu lamanya dalam refleksi kesitimewaan. Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam tatanan pemerintah daerah istimewa seharusnya membawa nilai-nilai yang tidak jauh dari Amanah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Adapun tujuan utama dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diaturkan dalam pasal tujuh (7), yang menjelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta diberi kewenangan lima (5) khusus berupa;

1. Urusan khusus tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur,
2. Urusan khusus kelembagaan pemerintah daerah,
3. Urusan khusus kebudayaan,
4. Urusan khusus pertanahan, dan
5. Urusan khusus tata ruang.

Selanjutnya untuk memperkuat urusan urusan khusus yang telah dijabarkan, maka Daerah Istimewa Yogyakarta dimandatkan tugas tambahan yang terdapat di Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa nilai

nilai Keistimewaan diatur dengan tujuan mewujudkan daripada;

1. Pemerintahan yang demokratis,
2. Kesejahteraan dan ketentraman masyarakat,
3. Tataan pemerintahan dan tataan sosial yang menjamin Ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
4. Menciptakan pemerintahan yang baik,
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

a. Faktor *Idealized Influence* (Pengaruh Ideal atau Karisma Diri)

Raja adalah Simbol Karisma Manusia Jogja

Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang Gubernur DIY dinyatakan sebagai salah satu pemimpin dengan pengaruh ideal. Pengaruh ideal hadir karena segenap lapisan masyarakat DIY menganggap Sultan Hamengku Buwono X adalah seorang Raja. Dalam budaya masyarakat DIY yang telah berkembang dari jaman *Swargi Dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga saat ini sebagai *local wisdom*, penghormatan *kawula alit* diberikan setinggi tingginya kepada raja, karena itulah dalam salah satu gelarnya Sultan Hamengku Buwono menyandang gelar *Ngarsa Dalem*

*Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun*¹, atau yang dapat singkat dengan *Ngarsa Dalem* saja.

Pengaruh ideal yang dikenal sebagai karisma secara tradisional sudah disandang oleh Sultan Hamengku Buwono X karena pengaruhnya sebagai Raja di *Nagari* Ngayogyakarta Hadiningrat yang meski pada saat ini merupakan sebuah jabatan adat atau simbol kebudayaan saja. Masyarakat daerah menganggap bahwa seorang *Sinuwun* adalah seorang raja yang diharapkan masyarakatnya untuk memberikan pengayoman bagi kesejahteraan kerajaan atau daerah yang dipimpinnya.

Penulis memahami dalam nilai sewindu keistimewaan DIY adanya penghormatan kepada Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin oleh pengikutnya sebagai kebanggaan penanaman nilai – nilai luhur budaya Kasultanan Ngayogyakarta yang dihidupkan dalam tataan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan ini menjadi keunikan tersendiri bagi salah satu keberagaman pemerintah daerah di Indonesia.

Visi “Memuliakan Manusia Jogja” sebagai Wujud Pengaruh Ideal Sultan dalam Sewindu Keistimewaan DIY

Pengaruh ideal Sultan Hamengku Buwono X diwujudkan dalam kemampuan, ketekunan, dan tekad dalam setiap gagasan pembangunan DIY. Pengangkatan

¹ Gelar Sultan Hamengku Buwono dalam Bahasa Jawa

Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY 2017 – 2020 dan momentum Sewindu Undang Undang Keistimewaan DIY (tahun 2020) mendorong Sultan Hamengku Buwono X memunculkan sebuah Visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tekad tersebut diciptakan oleh Sultan Hamengku Buwono X sebagai representatif dari tekad beliau yang lebih besar dalam RPJPD DIY 2005 – 2025, DIY dapat menjadi salah satu daerah dengan pusat peradaban manusia yang maju, mandiri, dan sejahtera di Kawasan Asia Tenggara. Selain itu adanya latar belakang sejarah, nilai budaya, nilai filosofi dan kondisi geografi dari DIY menjadi dorongan tekad Sultan Hamengku Buwono X untuk menjaga marwah keistimewaan DIY.

Sultan Menterjemahkan Tekadnya dalam Ruh Sewindu Keistimewaan DIY

Tekad terjemahan kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X juga diwujudkan dengan adanya pelaksanaan realiasi anggaran daerah yang ada di DIY. Untuk menambah kekuatan DIY, sejak adanya Undang Undang Keistimewaan dalam sewindu DIY juga diberi kekuatan tambahan berupa anggaran keistimewaan yang dikenal sebagai Dana Keistimewaan (Danais). Keberadaan APBD dan Danais kemudian menjadi kekuatan - kekuatan yang menopang tekad kepemimpinan untuk menuju visi besar dan tekad Sultan Hamengku Buwono X.

Pemanfaatan Danais yang dijabarkan ke dalam urusan kesitimewaan yang terbagi atas urusan khusus pengisian jabatan, urusan khusus kelembagaan, urusan khusus kebudayaan, urusan khusus pertanahan, dan urusan khusus tata ruang. Dalam kurun waktu sewindu kesitimewaan DIY, Sultan Hamengku Buwono X melalui *Paniradya Kaistimewan* DIY sebagai lembaga pengelola anggaran kesitimewaan mengutamakan pelaksanaan pembagian Danais dalam urusan khusus kebudayaan dengan pembagian anggaran di 2020 sebesar Rp. 744.003.521.915. Anggaran Keistimewaan urusan khusus kebudayaan difokuskan dengan pelaksanaan program kerja yang diantaranya pelestarian cagar budaya; pengembangan nilai sejarah dan nilai budaya; pelaksanaan even budaya; dan pengembangan kesenian budaya di DIY. Selanjutnya pembagian terbesar kedua didominasi pada program kerja urusan khusus tata ruang yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 541.972.542.392. Dalam anggaran urusan tata ruang tahun 2020, Sultan mencoba mengarahkan fokus program kerja yang kaitannya dengan nilai tata ruang filosofi DIY dan pembangunan JJLS (Jaringan Jalan Lintas Selatan) sebagai pendongkrak kesejahteraan masyarakat DIY bagian selatan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dianalisa bahwa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X telah membuat langkah maju yang signifikan. Sultan menekadkan untuk bekerja selangkah demi selangkah, konsisten, dan dengan sinergi lintas sektoral untuk

melaksanakan kegiatan program guna mencapai tujuan keistimewaan terhadap segala tantangan.

b. Faktor *Motivation Inspirasional* (Motivasi Inspirasi atau Inspirasi).

Sikap Optimis Sultan untuk Masa Depan Keistimewaan DIY

Keinginan Sultan Hamengku Buwono sudah jelas adanya dengan tujuan mensejahterakan. Selain mensejahterakan masyarakat Sultan juga menginginkan adanya sebuah nilai optimis yang dibangun dari konsensus nilai penting keistimewaan DIY. Optimisme Sultan terhadap refleksi sewindu keistimewaan DIY memberikan semangat adanya regenerasi bagi pembangunan DIY. Dalam Sapa Aruh Sewindu Keistimewaan DIY di Bangsal Pagelaran – Kraton Yogyakarta, Sultan mendorong adanya perbaikan dari energi negatif nilai keistimewaan dan mengubahnya kedalam sikap optimisme keistimewaan DIY.

c. Stimulasi Intelektual

***Manunggaling Kawula lan Gusti* dan Sumbu Filofsofi sebagai pemahaman pemikiran demokrasi dan kepemimpinan**

Manunggaling Kawula lan Gusti dapat dijabarkan bersatunya dan berpadunya lembaga kepemimpinan yang terbuka bagi seorang *Kawula* (masyarakat) dengan seorang *Gusti* (pemimpin) yang dimana harus mampu “ringan kaki” berdialog bahkan berdialektika dengan masyarakat. *Manunggaling Kawula lan Gusti* dalam naskah tersebut menjelaskan bahwa suatu konsepsi bagaimana seorang pemimpin harus demokratis yang dikembangkan pada nilai luhur loyalitas, kepercayaan, dan keikhlasan.

Tahta Untuk Rakyat sebagai landasan pemikiran intelektual menciptakan pemerintahan yang baik sesuai amanah Keistimewaan DIY

Konsepi Nilai Filosofi *Manunggaling Kawula lan Gusti* didukung sebagai nilai yang menciptakan pemerintahan demokratis dalam nilai keistimewaan ini juga dikuatkan dengan filosofi Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat, “Tahta Untuk Rakyat”. “Tahta Untuk Rakyat” sebagai filosofi seorang Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat lahir ketika Ayahanda beliau (Almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX) masih menjabat sebagai seorang Sultan sekaligus seorang Gubernur, Nilai Konsepsi Tahta Untuk Rakyat dilanjutkan oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam mengemban amanah Gubernur DIY untuk menjalankan pemerintah daerah dalam bingkai keistimewaan.

“Tahta Untuk Rakyat” pada dasarnya memiliki makna yang berarti keberpihakan, kebersamaan, dan satu padunya penguasa dan rakyat. Oleh karenanya antara filosofi *Manunggaling Kawula lan Gusti* dan tata Sumbu Filosofi DIY dengan “Tahta Untuk Rakyat” tidak dapat dipisahkan.

***Hamemayu Hayuning Bawono* sikap intelektual Sultan Hamengku Buwono X dalam mensejahterakan Manusia Jogja**

Nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* meruakan sebuah gambaran besar dari pemahaman makrokosmos dari seorang Sultan Hamengku Buwono X yang dibawa pengaruhnya dalam Pemerintahan

DIY. Sejatinya Hamemayu Hayuning Bawono merupakan konsepsi yang mampu menjadi lintasan bagi tema, konteks, ruang, dan waktu. Konsep *Hamemayu Hayuning Bawono* sudah ada sejak *swargi dalem* Hamengku Buwono I yang pada dasarnya konsepsi meliputi dengan adanya pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya stimulasi intelektual dari *Hamemayu Hayuning Bawono* oleh Sultan Hamengku Buwono diturunkan kedalam beberapa nilai *Hamemayu Hayuning* lainnya. Penulis menemukan penjabaran data dari stimulasi intelektual *Hamemayu Hayuning Bawono* sebagai pemahaman yang lebih dalam akan nilai piker Sultan Hamengku Buwono X dalam Buku Panduan Penggunaan Danais DIY Tahun 2020 yang kurang lebih dapat dibagi kedalam;

1. Pembangunan lingkungan dan tata ruang fisik, dengan penekanan terhadap penciptaan ruang ruang wilayah DIY yang *Rahayu*, tidak eksploitatif, serakah, dan sewenang - wenang.
2. Pembangunan Ekonomi, dengan penekanan terhadap nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Kawula*.
3. Pembangunan Sosial, dengan penekanan terhadap nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Bebrayan*.
4. Pembangunan Pendidikan, dengan penekanan nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Rasa Cipta Karsa*.
5. Pembangunan Teknologi, dengan penekanan nilai

filosofi *Hamemayu Hayuning Karya*.

6. Pembangunan Budaya, dengan penekanan nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Budhaya*.

7. Pembangunan Hukum, dengan penekanan nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Kautaman*.

Hamemayu Hayuning Bawana dalam penjabaran nilai *Rahayu* dan nilai *Hamemayu Hayuning* yang lainnya. Konsepsi ini diwujudkan oleh Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang Gubernur untuk memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai luhur tersebut menjadi ciri khas yang dibawa oleh seorang Sultan Hamengku Buwono dari “kediaman” Budaya Jawa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat kedalam “Rumah Tangga” Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membawa Manusia Jogja yang Bermartabat. Selain itu sinergi antar nilai/ konsep/ pengetahuan Filososfi DIY sebagai stimulasi intelektual dari Sultan Hamengku Buwono X merupakan sebuah hal yang satu padu dan sinergi dalam pelaksanaannya, olehnya ketika berbicara filosofi satu akan berkaitan dengan filosofi filosofi yang lainnya.

Budaya SATRIYA bagian Stimulasi Intelektual bagi Pengikut untuk membangun Jogja

Budaya SATRIYA merupakan pemahaman dari pola pikir Sultan Hamengku Buwono X dalam menciptakan budaya organisasi perangkat daerah yang iklimnya harus melayani masyarakat. Budaya SATRIYA sebagai inisiatif Pemda DIY dalam menata pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat

memperoleh banyak dukungan dari berbagai stakeholder baik legislatif hingga eksekutif dan pemerintahan daerah yang berada pada tatanan vertikal Pemda DIY.

Budaya SATRIYA menumbuhkan semangat etos kerja bagi Sultan Hamengku Buwono X dan jajaran ASN Pemda DIY. SATRIYA dapat ditafsirkan sesuai dengan filosofi diatas sebagai manusia yang mampu membawa pribadi kesatria atau pahlawan. Atau dalam kontekstual reformasi birokrasi DIY, SATRIYA dijabarkan dengan singkatan Selaras, Akal budi luhur – jatidiri, Teladan – Keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, dan Ahli-profesional. Sehingga dengan penjabaran tersebut, pengikut Sultan dalam satuan tugas OPD di DIY dituntut untuk mampu menciptakan iklim kerja membangun manusia Jogja. Budaya SATRIYA digadang juga sebagai budaya yang mampu menuntaskan permasalahan pembangunan yang ada DIY.

ASN dituntut Inovatif dan Kreatif oleh Sultan Hamengku Buwono X

Sultan menuntut ASN untuk berpikir inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan DIY. Tuntutan beliau sebagai pemimpin memperkuat tuntutan indikator stimulasi intelektual. Dalam indikator stimulasi intelektual, Sultan Hamengku Buwono X selain memahami nilai nilai lampau yang adaptif dan menciptakan iklim organisasi pada pelayanan masyarakat, Sultan Hamengku Buwono X juga mendorong adanya ide ide inovatif dan kreatif sebagai solusi ASN dalam pembangunan daerah.

Sultan mampu bertanggungjawab atas inovasi dan kreatifitas yang dilakukan ASN di Pemda DIY. Sultan mampu memberikan perlindungan bagi ASN, datang dan berkunjung di wilayah wilayah masyarakat memberikan stimulasi intelektual sehingga permasalahan daerah setidaknya dapat terselesaikan dengan solusi meski tidak bisa memuaskan berbagai pihak masyarakat.

d. *Individualized Consideration* (Pertimbangan yang bersifat Individual)

Sultan Memilih Mendukung Demokrasi dalam Nilai Keistimewaan

Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dalam melaksanakan roda pemerintahan yang bersifat keistimewaan diangkat dan lahir konsensus sebagai kepala daerah istimewa yang diangkat dari sistem monarki Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, merupakan intisari akar sejarah terhadap seorang Sultan Hamengku Buwono sebagai pemimpin daerah yang bersifat Istimewa; Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski dengan adanya sebuah kondisi yang seperti itu akan tetapi dalam kepemimpinannya di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Sultan Hamengku Buwono X memilih mendorong adanya pertumbuhan dan tatanan demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih dalam lagi, perwujudan dari pernyataan diatas dibuktikan dengan hak berdemokrasi di DIY yang dikehendaki oleh Sultan, dijabarkan sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI). Jaminan berdemokrasi di DIY dikembangkan kedalam tiga (3) aspek keutama, yakni; kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Jaminan berdemokrasi di DIY yang diakomodasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dapat disajikan kedalam data dari perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di DIY. Dalam waktu tiga (3) tahun terakhir Indeks Demokrasi Indonesia sebagai parameter pengukuran nilai demokrasi di DIY mengalami kenaikan juga penurunan. Berikut merupakan gambaran Indeks Demokrasi Indonesia di Wilayah DIY;

Momentum Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tiga (3) Kabupaten di DIY (Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, dan Kab. Sleman) bertepatan juga dengan Sewindu Keistimewaan DIY, sehingga adanya momentum tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong masyarakat DIY untuk ikut serta pada Pilkada 2020. Menurut Sultan Hamengku Buwono X, Pilkada 2020 merupakan momentum tatanan masa depan Keistimewaan DIY itu sendiri.

Sultan Hamengku Buwono X boleh saja Tidak Memilih Berdemokrasi

Sultan Hamengku Buwono X dapat saja mengutamakan nilai Keistimewaan DIY daripada mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis. Hal tersebut dapat saja Beliau lakukan dengan cara mengajukan sebuah *judicial review* terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menghapus poin tujuan keistimewaan DIY “Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis” dan

mengembalikan tatanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam “*Paugeran Kasultanan Ngayogyakarta*” seperti pada masa Suwargi Sri Sultan Hamengku Buwono yang sebelumnya yang dalam roda pemerintahannya banyak melibatkan Bangsawan Jawa dalam roda pemerintahannya.

Berdasarkan hal tersebut berarti juga akan tercipta sebuah sistem Monarki yang kental di dalam negara republik, atau sebuah negara yang tumbuh dalam negara. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang penguasa, karena pada hakikatnya beliau meneruskan amanah swargi ayahandanya (Sri Sultan Hamengku Buwono IX) atas dasar Amanat 5 September 1945, yang pada salah satu poinnya dibunyikan sebagai berikut; “Bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa Negara Republik Indonesia”

Kebhinekaan Memberi Warna Keputusan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kepala Lembaga Kraton Yogyakarta

Sultan Hamengku Buwono X juga menjamin adanya keberlangsungan kehidupan sosial dalam menjaga nilai prulalisme dalam tatanan pemerintah daerah istimewa. Sultan memahami Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai minatur kecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya jaminan dalam mewujudkan kehidupan sosial dan bermasyarakat dalam lingkup luas Ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an juga termasuk dalam tujuan dalam nilai nilai Keistimewaan DIY. Lebih lanjutnya keputusan Sultan itu tidak serta merta akan mengganggu jalannya

keistimewaan DIY. Hal yang demikian rupa telah menjadi bagian yang melekat dalam Keistimewaan DIY. Oleh karenanya bagaimana nilai keistimewaan dengan nilai Bhineka Tunggal Ika harus bisa menjadi sebuah bagian yang selaras dan harmonis.

e. Menilik Kegagalan Kiprah Sultan Hamengku Buwono X dalam Refleksi Sewindu Kesitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Trend Kemiskinan yang Besar di DIY mendorong ketimpangan besar ketika Sultan Memotivasi Kesejahteraan

Fokus Kesejahteraan menjadi salah satu Motivasi Sultan untuk mengentaskan kemiskinan dilatar belakang dengan adanya trend kemiskinan DIY yang dapat dinayatakan masih relatif tinggi. Trend Kemiskinan pada masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X dalam momentum sewindu keistimewaan DIY menyentuh pada angka 475,72 ribu orang atau 12,28 persen terhadap total penduduknya. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 34,8 ribu orang dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dalam keadaan dan realita di lapangan kerap kali muncul buah pertanyaan di benak masyarakat bahwa di DIY memiliki Danais akan tetapi kenapa tidak digunakan untuk memfokuskan kesejahteraan?

Evaluasi penggunaan Danais pada momentum sewindu keistimewaan DIY yang dinyatakan oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang dilansir penulis dari Republika.co.id bahwa alokasi Danais hanya terfokuskan dalam

beberapa program saja, sehingga pemanfaatan Danais tidak merata bagi masyarakat DIY.

Selanjutnya, membahas motivasi untuk mensejahterakan masyarakat yang didorong oleh keluhan Sultan kepada OPD tentu tidak lepas dengan tekad Sultan yang tertuang dalam visi pembangunan daerah. Sultan menginginkan beranda jogja diubah dari utara ke selatan dengan maksud segenap OPD untuk berani dan wajib menciptakan kesejahteraan terutama di wilayah selatan DIY. Capaian dari keinginan sultan untuk mensejahterakan DIY tidak serta merta mulus tanpa ada kendala, berbicara motivasi dan keinginan Sultan juga akan membahas apa yang telah hasil yang telah dilaksanakan. Penulis menemukan data dalam penelitian meski banyak program kerja yang telah terlaksana akan tetapi keberlangsungannya tidak serta merta hasil akhirnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sultan itu sendiri.

Kelemahan dalam membawa Legitimasi Langit sebagai keputusan yang irasional

Bayu Dardias (2016) menyatakan bahwa Sultan Hamengku Buwono X dalam kurun waktu momentum setelah diterbitkannya Undang – undang keistimewaan mencoba untuk memanfaatkan kekuatannya sebagai pemimpin politik untuk menyiapkan kaderisasi bagi keberlanjutannya mempertahankan dinasti politiknya. Tepatnya pada tahun 2015 dengan adanya Sabda Raja dan Dhawuh Raja, Sultan Hamengku Buwono X mengubah gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dan mencoba menjadikan sebagai putri

mahkota. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa keputusan ini kemudian menimbulkan konflik internal yang besar dalam aristokrasi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Banyak pertentangan yang dilakukan oleh para *Rayi Dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena *Sabda* dan *Dawuh Raja* tersebut dianggap melanggar Pugeran dari leluhur dari Kesultanan Yogyakarta.

Intisari dari Subbab ini adalah sebuah pembahasan yang kontradiksi dari kelemahan Sultan Hamengku Buwono X dalam kepemimpinannya, dalam pembahasan ini memang banyak membahas sebuah keputusan pribadi yang bersifat politis daripada birokratis. Sehingga meski tidak begitu berkolerasi dengan paduan teori akan tetapi sebuah temuan masalah ini sangat menarik untuk dibahas. Selanjutnya permasalahan terbesar dari pembahasan ini adalah sebuah kekuatan legitimasi langit yang masih dipertahankan oleh Sultan Hamengku Buwono X sendiri untuk menetapkan suatu putusan dalam *Sabda* dan *Dawuh Raja* yang pada hakikatnya dalam dunia ilmiah keputusan tersebut didasari dengan hal yang empiriknya belum tentu benar atau dapat dikatakan sebagai keputusan individu yang berargumentasi irasional.

Pada 30 April 2016, Sultan Hamengku Buwono X menyebut nama Tuhan dan Leluhur Mataram Islam untuk mengubah gelarnya. Sultan Hamengku Buwono X dalam sabdanya mencoba menterjemahkan sebuah titah yang narasinya adalah sebuah “mandat” yang diberikan oleh Tuhan dan para Leluhur Mataram

kepadanya. Penggunaan “kekuatan Tuhan dan leluhur” diindikasikan sebagai bahasa langit yang kemungkinan hanya dipahami oleh seorang Sultan dan hal Ghaib itu sendiri, hal tersebut menjadi sebuah kekuatan Sultan dalam legitimasinya untuk memberikan sebuah perintah kepada pengikutnya untuk berkewajiban melaksanakan sabda tersebut.

Sabdatama dan *Dawuh Raja* yang dibawa Sultan jelas menimbulkan sebuah pertentangan yang besar bagi internal Keraton Yogyakarta. Pertentangan tersebut dilakukan oleh *putra dalem swargi dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono IX dikarenakan menurut *Putra Dalem Swargi Dalem, Sabda* dan *Dawuh Raja* merupakan keinginan semata dari Sultan Hamengku Buwono X untuk menyiapkan legitimasi kekuasaan penggantinya kelak, bukan semata mata karena sebuah titah dan amanah dari langit (Tuhan/ Leluhur Mataram Islam). Terlebih *Dawuh* dan *Sabda* dianggap tersebut melanggar *paugeran* leluhur yang semestinya.

Analisa *Sabda* dan *Dawuh Raja* yang menggunakan legitimasi langit sebagai dasarnya tentu saja menjadi kurang reflektif bagi teori Bass dan Riggio (2006). Bass dan Riggio (2006) menyatakan pemimpin sejatinya mampu menjadi mentor dan mampu mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dan tepat diantara dua perbedaan/ permasalahan besar. Pernyataan Sultan akan *Sabda* dan *Dawud Raja* pada tahun 2015 sebagai keputusan pribadi hingga pada momentum sewindu keistimewaan menimbulkan konflik internal, meski secara signifikan tidak mengganggu jalannya dan keberlangsungannya

sistem pemerintahan DIY akan tetapi bagi pengikut aristokrasi Jawa terutama keluarga besar Kesultanan Ngayogyakarta, keputusan itu mengecewakan. Terlebih argumentasi dari *Sabdatama* dan *Dawuh Raja* menggunakan basis legitimasi langit yang secara rasional hanya dipahami oleh Sultan Hamengku Buwono X saja.

E. PENUTUP

Sultan Hamengku Buwono X merupakan seorang pemimpin yang mampu merangsang dan menginspirasi tekad kuatnya untuk mendorong segenap satuan OPD keistimewaan DIY untuk menjaga nilai keistimewaan DIY, bahkan OPD mampu menterjemahkan, menjelaskan, dan menggambarkan tekad Sultan diluar batas kemampuan secara inovatif dan kreatif. Kiprah Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin merupakan sebuah hasil kolaborasi dari nilai intelektual yang luhur masa lampau yang diadaptifkan oleh Sultan dengan kondisi DIY sekarang untuk menjawab tantangan – tantangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih dalam menjaga tujuan keistimewaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Sultan Hamengku Buwono X

memiliki kiprah yang besar sebagai pemimpin yang transformatif.

Selanjutnya, Sewindu Keistimewaan DIY menandai telah terjaganya kepemimpinan yang bersifat istimewa dari Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemegang kewenangan memimpin DIY selama sewindu. Akan tetapi dari hasil pembahasan dalam Bab sebelumnya, prosesi keistimewaan selain melahirkan kewenangan yang istimewa bagi Sultan Hamengku Buwono X juga melahirkan suatu kewajiban bagi Sultan Hamengku Buwono X untuk memuliakan tujuan tujuan kesitimewaan DIY, yang diantaranya mewujudkan pemerintahan yang demokratis; mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat; mewujudkan kehidupan sosial dan bermasyarakat dengan nuansa Kebhinka-Tunggal-Ika-an; mewujudkan pemerintahan yang baik; dan melembagakan peran Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagai warisan budaya bangsa. Tujuan yang dicantumkan dalam keistimewaan itulah yang menjadi garis besar dalam pembahasan penelitian ini.

REFERENSI

- Adji, Julius Pour & Nur. *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat 100 Tahun Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Antonakis, J. *Transformational and Charismatic Leadership*. California: SAGE, 2012.
- Avolio, B. J. *Full leadership development: Building the vital forces in organizations*. California: SAGE, 1999.
- Avolio, Bernard M. Bass & B. J. *Multifactor Leadership Questionnaire*. California: Consulting Psychologists Press, 1990.
- Avolio, Bernard M. Bass & B. J. "The Implications of Transactional

- and Transformational Leadership for Individual, Team, and Organizational Development.” *Research in Organizational Change and Development*, 1990: 231–272.
- Bass, Bernard M. *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Press, 1985.
- Berita : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 15 Juli 2020. <https://jogjaprovo.go.id>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006 .
- Burns, James M. *Leadership*. New York: Harper & Row., 1978.
- Creswell, Jhon W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- DIY, Badan Pendapat Daerah Provinsi. *Bappeda : Dataku*. 2021. http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/34-ringkasan-apbd (diakses Juni 29, 2021).
- DIY, BAPPEDA. *LKPJ DIY 2020*. Laporan Kinerja, Yogyakarta: BAPPEDA DIY, 2021.
- DIY, BAPPEDA. *RPJMD 2020*. Rancangan Kinerja Daerah, Yogyakarta: BAPPEDA DIY, 2019.
- DIY, BPS. *BPS DIY*. 2020. <https://yogyakarta.bps.go.id>.
- DIY, KPU. *KPU DIY*. 2020. <https://diy.kpu.go.id/page/read/44/arsip-pilkada>.
- DIY, Paniradya Kaistimewan. *Buku Pelaksanaan Sewindu Keistimewaan DIY 2013-2020*. Yogyakarta: Paniradya Kaistimewan DIY, 2020.
- DIY, Pemda. *Profile - Pemda DIY*. 2022. <https://jogjaprovo.go.id> (diakses 2022).
- Gardner, K. B. Lowe & W. L. “Ten Years of The Leadership Quarterly: Contributions and Challenges for The Future. .” *Leadership Quarterly* 11 (2001).
- Indonesia, Wikipedia. *Sri Sultan Hamengku Buwono X - Wikipedia*. 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_X#/media/Berkas:Hamengkubuwono_x.jpg (diakses 2022).
- Kaistimewan, Paniradya. *Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020*. Yogyakarta: Paniradya Kaistimewan, 2019.
- Kurniadi, Bayu Dardias. “Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X.” *Masyarakat Indonesia*, 2016: 41-42.
- Margantoro, Y.B. *Sri Sultan hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat*. Yogyakarta: Grasindo, 1999.
- Mohammad Roem, Dkk. *Takhta untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosadakarya, 2018.
- Northouse, Peter G. *Leadership Theory and Practice - Seventh*

- Edition* . California: SAGE Publications, Inc., 2016.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Profil Pemerintah Daerah : Visi dan Misi*. 2019. jogjaprovo.go.id .
- Rifayani, Sofie Dwi. “Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokatisasi dan Efektivitas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2013.
- Riggio, Bernad M. Bass & R. E. *Transformational Leadership (2nd ed.)*. New Jersey: Lawrence Erlbaum. , 2006.
- Rondinelli, Cheema G. Shabbir & Dennis A. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/ London/ New Delhi: Sage Publications, 1983.
- Rue, GR. Terry & LW. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Sabdacarakatama, Ki. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Shalahuddin. “Karakteristik Kepemimpinan Transformasional.” *Jurnal Kependidikan Islam* 6 (2015).
- Soekiman, Drs. Djoko. *Kotagede*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 1992/1993.
- Steidlmeier, Benard M. Bas & P. “Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership.” *Leadership Quarterly (Leadership Quarterly)*, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia* . 1945.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2013*. 2013.
- Yogyakarta, Tim Pemerintah Daerah Daerah Istimewa. *Sejarah Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemda DIY, 2017.
- Yulk, Gery. *Leadership in Organizations - Eighth Edition*. New York: Pearson Education, Inc., 2013.